

**“PENAMBAHAN UMUR DALAM PROSES PERKAWINAN
TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PALANGGA
KELURAHAN BULUTANA KABUPATEN GOWA”**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

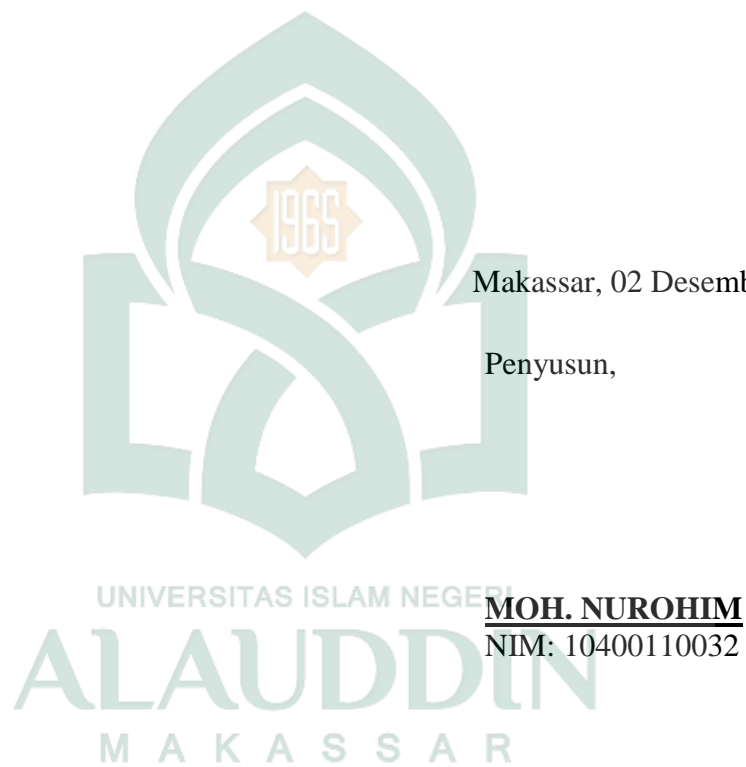
MOH. NUROHIM

NIM: 10400110032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.




PERSETUJUAN PEMBIMBING


Penulisan skripsi Saudara MOHAMAD NUROHIM, NIM: 10400110032, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Penambahan Umur Dalam Proses Perkawinan Terhadap Anak di desa Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk disidangkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 09 Oktober 2014



Dr. Siti Aisyah Kara M.Ph.I
NIP:196412311992032015



Dr. Azman M.Ag
NIP: 196604071994031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penambahan Umur Dalam Proses Perkawinan Terhadap Anak Di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa.” Yang disusun oleh MOH. NUROHIM NIM: 10400110032, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 02 Desember 2014, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Makassar, 02 Desember 2014

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

Sekretaris : Dra. Sohras, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dra. Sohras, M.Ag. (.....)

Penguji II : Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. Siti Aisyah Kara, MPh.I. (.....)

Pembimbing II : Dr. Azman M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Penambahan Umur Dalam Proses Perkawinan Terhadap Anak Di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa”** Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun materil. Karena itu kemudian, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta

khususnya kedua orang tua penulis Ayahanda Fadkhul Majid dan Ibunda Jamilah, serta Anak tercinta Aisyah Jannatul Ma'wa dan Isteri tercinta Ismawati dengan susah dan jerih payahnya memberi dukungan moril dan materil serta do'yang tak henti-hentinya baik diwaktu kuliah maupun diwaktu penyelesaian skripsi ini. Kepada kakak dan seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Bapak Prof. DR. H. Ali Parman, M.A, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Dr. Abdillah Mustari., M.Ag, selaku ketua dan Achmad Musahid. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Siti Aisyah Pembimbing I dan Bapak Dr. Azman selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

6. Sahabatku-sahabat seperjuanganku sekaligus saudara terbaikku Amril Mariolo AR, Rusdiani, Firmansyah, Ian Syafutra, Muh. Jabbar Nur, Tri Hardiman, Andi Arwini, Indah Mas'ud, Desrikanti BK, Muliyanha, Anti, Sri Wahyu Astuti, Hajia Pasadu serta seluruh mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Angkatan 2010 yang setiap saat mewarnai hidupku dalam suka dan duka.
7. Sahabat-sahabat tercintaku Fadlia, Naga, Azlan, Sidra yang berada di tempat KKN Malino Posko IV, dan teman-teman KKN-49 secara keseluruhan yang tak dapat saya sebut satu persatu, yang telah menjadi keluarga dalam menjalankan sebagian dari kehidupan ini
8. Terima kasih kepada sahabat saya Rusdiani dan Faruk yang telah banyak membantu saya berupa saran-saran, sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Dan ucapan banyak terima kasih kepada sahabat sahabatku yang pernah melalui hidup bersama di kost atau di masjid dengan susah atau senang Ulil, Rito, Yono, Izhar, Fansuri, Hasrul, yang ikhlas bersama untuk menjadi orang yang sukses tak kenal hujan maupun panas mereka selalu ada untuk mencurahkan segala gundah di hari-hari sulit demi meraih cita-cita dengan saling memberi dukungan untuk selalu bangkit.
10. Taklupa pula kepada Ayahhanda H. Tahirtaro dan Ibunda Hj. Rukiah Baddu yang begitu sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis yang tak dapat dibalas dengan materi hanya Allah yang dapat membalasnya, selama penulis berada di kediaman banyak ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh. Inilah orangtuaku yang kedua, setelah Ibu

Bapak kandugku yang banyak memberikan kontribusi dalam hal apapun. Dan kepada adik-adiku Fahri, Fenti, Fuad, Fifi terima kasih telah memberikan yang terbaik kepada keluarga kecil penulis dan dukungan semangat sehingga penulis menjadi lebih tegar dalam menjalani hari-hari yang sulit.

11. Kepada Ayah handa Dg. Tompo dan Ibunda Dg Ngugi serta adik-adiku Sam, Dilla, Anna, yang telah membantu dan mendukung aktifitas selama perantauan dengan kerendahan hati penulis merasa sangat terbantu, kabaikan kalian takanku lupakan.
12. Dan tak kalah penting juga atas jasa-jasa dan bantuan atas kerendahan hati bapak ibu yang penulis anggap seperti keluarga sendiri yaitu Daeng Tojeng dan Daeng Te'ne sekeluarga yang banyak memberi partisipasi dalam hal apapun, semoga kerendahan hatinya di balas oleh Allah SWT.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, 02 Desember 2014
Penulis,

MOH. NUROHIM
NIM: 10400110032

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Dasar Hukum Perkawinan	15
C. Batasan Umur Dalam Hukum Islam	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	
A. Jenis Dan Lokasi Peneitian	24
B. Pendekatan Penelitian ABCD.....	24
C. Jenis Dan Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	28

BAB	IV	HASIL PENELITIAN	
		A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian	30
		B. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur Dan Proses	
		Penambahan Umur Dalam Perkawinan	57
		C. Penambahan Umur Menurut Undang-undang	
		No. 1 Tahun 1974	62
		D. Pandangan Masyarakat Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa	
		Dalam Memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1974	63
BAB	V	METODOLOGI PENELITIAN	
		A. Kesimpulan	72
		B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA.			75
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			

ABSTRAK

Nama Penyusun : Moh. Nurohim
NIM : 10200110032
Judul Skripsi : Penambahan Umur Dalam Proses Perkawinan Terhadap Anak Di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa

Pernikahan merupakan anjuran agama Islam dan merupakan anugerah yang diberikan kepada umat manusia, untuk itu patutlah bersyukur sebagai hamba atas nikmat-Nya. Untuk itu jika ingin mengikuti Sunnah Rasulullah Saw maka harus ada 2 (dua) aspek yang diperhatikan yaitu kesiapan fisik dilihat dari segi ekonomi dan kesiapan mental dilihat dari usia, menjadi permasalahan jika jasmani dan rohani belum siap dalam menghadapi tanggung jawab yang berat.

Pernikahan usia muda terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi faktor zaman dapat mempengaruhi pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah yang di kenal dengan istilah MBA (*Married By Accident*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat Lingkungan Palangga dalam memahami Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam penerapannya yang berkaitan dengan penambahan umur dalam proses perkawinan terhadap anak. Selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor pernikahan usia muda dikalangan generasi muda di Lingkungan Palangga dan bagaimana pandangan Islam dan Undang-undang menyikapi hal tersebut.

Untuk mendukung penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung. Data yang diperoleh yaitu dari hasil observasi dan wawancara, hasil penelitian tersebut penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang resiko pernikahan usia muda dan pengetahuan mengenai peraturan Undang-undag pernikahan. Faktor pernikahan tersebut adalah faktor ekonomi, MBA, dan takut berbuat maksiat, namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Dampak dari penambahan umur tersebut menyebabkan tidak harmonisnya rumahtangga, yang berujung pada perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa kebahagiaan demi mencapai kehidupan rumah tangga yang baik. Lebih dari itu, ikatan ini menjadi faktor utama pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga pergaulan suami isteri merupakan persenyawaan jiwa raga dan cipta rasa antara suami isteri diwajibkan bergaul dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman QS An-Nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

¹ Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Buku III; Akademika Persero, 1992), h. 45.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²

Dari ayat tersebut jelas akan kesakralan sebuah perkawinan, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakatnya. Dibuktikan dengan diberlakukannya setidaknya dua peraturan khusus perkawinan yang harus diketahui. Kedua peraturan tersebut adalah instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Sesuai dengan firman Allah QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009), h. 406.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 46.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Kedua peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam. Terdapat beberapa hal dalam regulasi keduanya yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti adanya pembatasan usia nikah, keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan perceraian hanya terjadi dimuka pengadilan, dan sebagainya. Motivasi ketiga hal tersebut adalah demi mewujudkan kehidupan berumah tangga yang lebih baik. Oleh karena ketiganya tidak diatur dalam hukum Islam, maka menjadi wajar jika masih ditemukan beberapa bentuk pengabaian terhadapnya dengan dalih bahwa, secara materiil bukan berasal dari hukum Islam. Fenomena ini masih sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat, walaupun Undang-Undang tersebut diperuntukkan kepada warga Indonesia secara umum, namun nilai-nilai yang terkandung didalamnya cukup merepresentasikan hukum perkawinan Islam. Sedangkan kompilasi hukum Islam sejak awal pembentukannya memang dimaksudkan untuk diberlakukan pada masyarakat Islam sehingga menjadi wajar jika nuansanya lebih bernuansa Islam.

Masyarakat yang masih awam terhadap hukum Islam dan umumnya berpendidikan rendah, perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai pembatasan usia nikah. Undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adalah ketika mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.

sedangkan usia nikah bagi seorang perempuan adalah ketika mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan.⁵ Maksudnya Undang-Undang tersebut memberi peluang atau dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut untuk melangsungkan pernikahan namun dengan mekanisme yang telah disepakati. Pertimbangan untuk diberikannya dispensasi tersebut karena calon mempelai dikhawatirkan melakukan pelanggaran norma agama dan norma sosial.

Penetapan mekanisme tersebut masih simpang-siur karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara jelas, akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai usia baligh atau terhadap seorang perempuan yang belum menstruasi. Dan dalam fiqh tidak secara tegas diatur akibat tiadanya dalil yang secara eksplisit mengaturnya, sedangkan dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak dibawah umur adalah ketika usia anak tersebut belum masuk pada umur yang telah ditetapkan.

Mengingat problem di atas membingungkan masyarakat, sehingga banyak didapati perkara yang sudah dianggap wajar pada masyarakat yaitu menambah umur mempelai baik laki-laki maupun perempuan padahal belum masuk kategori dewasa, indikasi hukum di atas belum mencerminkan asas perkawinan yang dimaksud Undang-Undang tersebut. Jelas bahwa terdapat kesenjangan antara dua aturan yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu aturan agama dan hukum. Padahal,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* (Cet. I; Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 59.

baik aturan agama maupun aturan hukum yang bersumber pula dari sosial yang merupakan payung kehidupan dalam masyarakat.

Kedewasaan dalam perkawinan merupakan prinsip perkawinan dengan tujuan bahwa setiap calon suami atau isteri yang hendak melangsungkan akad nikah harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (jasmani dan rohani). Ini merupakan manifestasi dari arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada beberapa masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dengan cara mencukupkan umur agar seolah-olah dianggap sebagai suatu pernikahan yang umum dan normal dilakukan.

Oleh karenanya, menjadi wajar jika dikhawatirkan adanya langkah-langkah yang tidak dibenarkan. Kekhawatiran tersebut berkaitan erat dengan efektivitas pemberlakuan Undang-undang ini, khususnya dalam regulasi batasan usia nikah ditengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada.

Akan tetapi secara sosiologis, masih dapat dipertanyakan, dikatakan demikian, karena banyak praktik pernikahan dengan cara yang beresiko dengan berbagai alasan, jika sebuah peraturan dinilai baik, namun tidak dipatuhi oleh masyarakat, tentu ada faktor yang menyebabkannya, pihak yang memiliki peran penting di masyarakat adalah para penegak hukum, dalam kaitannya ialah petugas kantor urusan agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat untuk memberi arahan.

Pihak-pihak inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum, memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran

masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegakan hukum, termasuk dalam memberikan kebijaksanaan dan teladan yang baik manakala terdapat kesenjangan, seperti dalam pembatasan usia nikah yang notabene tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan negara mengaturnya.

Keadaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan masyarakat setempat terhadap hukum, kebiasaan ini seolah dianggap sebagai tindakan yang wajar dilakukan tidak ada upaya perbaikan dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Tindakan ini umumnya diambil oleh para orang tua secara sepihak, sekali pun anaknya masih terbilang sangat belia dan secara mental belum siap untuk membangun rumah tangga apalagi untuk mencapai nilai sakinah dalam rumah tangga sebagaimana dicita-citakan agama dan negara. Mengingat bahwa hukum dan agama yang terletak di Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa terbilang mengakar, namun seolah menjelma menjadi adat kebiasaan, sehingga sulit dibedakan adat masyarakat setempat dengan hukum yang berlaku.

Hasil pendataan pemerintah di Kelurahan Bulutana dengan BPS tahun 2009 - 2010 jumlah penduduk terdiri atas 609 KK, dengan jumlah keseluruhan adalah 2.300 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.141 jiwa dan perempuan 1.159 jiwa.⁶ Dari data yang ditemukan, tingkat perkawinan dengan cara tersebut tidak tercatat secara jelas di kantor urusan agama (KUA), karena dalam prosesnya data yang diperoleh dari pihak

⁶ Data Tinggimoncong dalam angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2009. dan data Kader PPKBD dan Dasawisma Oktober tahun 2010. (data diambil dari kantor Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa).

mempelai laki-laki dan perempuan maupun pihak keluarga adalah data yang telah disepakati bersama, sehingga data yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah adalah data fiktif. Inilah yang mengakibatkan semua proses perkawinan tersebut menjadi rahasia umum di masyarakat, namun dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis dapatkan di lapangan ada 8 (delapan) pasangan yang diketahui menikah dengan cara tersebut, sisanya kurang lebih 12 (dua belas) pasangan menikah dengan cara yang sama, namun data pasangan yang di maksud kurang lengkap informasi dan datanya sehingga peneliti tidak dapat menyimpulkan jumlah keseluruhannya secara pasti.

Beberapa pasangan yang menikah usia di bawah umur dengan menamahkan umur untuk melengkapi persyaratan pernikahan, diantaranya ada 8 (delapan) Pasangan yang melangsungkan pernikahan yang di maksud yaitu:

1. Misbahul Munir menikah dengan Laila Sintia, menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2000, pada saat itu usia mempelai laki-laki 14 tahun dan mempelai perempuan 13 tahun.
2. Ialang Agus Menikah dengan Jumi Agustina, menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 2007, pada saat itu usia mempelai laki-laki 16 tahun dan mempelai perempuan 14 tahun.
3. Aspar Sadik menikah dengan Wulan Sari, menikah pada tanggal 12 April tahun 2004, pada saat itu usia mempelai laki-laki 16 tahun dan mempelai perempuan 11 tahun.

4. Muh. Tahir Taro menikah dengan Miftahul Jannah, menikah pada tanggal 12 Januari tahun 1991, pada saat itu usia mempelai laki-laki 15 tahun dan mempelai perempuan 10 tahun.
5. Muh. Aldiansyah Saputra menikah dengan Andi Emma sohra, menikah pada tanggal 30 Agustus tahun 2011, pada saat itu usia mempelai laki-laki 16 tahun dan mempelai perempuan 13 tahun
6. Jasad Ali Jafar menikah dengan Jumriati Nasirah Rasyid, menikah pada tanggal 18 Maret tahun 2013, pada saat itu usia mempelai laki-laki 17 tahun dan mempelai perempuan 15 tahun
7. Abdul Rahim Gappa menikah dengan Cika Indahsari, menikah pada tanggal 22 Januari tahun 2001, pada saat itu usia mempelai laki-laki 18 tahun dan mempelai perempuan 13 tahun
8. Ibnu Sina Gafur menikah dengan Intan Purnama Sari BK, menikah pada tanggal 17 Desember tahun 2000, pada saat itu usia mempelai laki-laki 16 tahun dan mempelai perempuan 11 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan permasalahan pokok yakni bagaimana **Penambahan Umur Dalam Perkawinan Terhadap Anak di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa**. Sehingga sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang disebut dengan perkawinan dibawah umur dan penambahan umur di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana kab. Gowa. ?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat palangga terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana kab. Gowa. ?
3. Bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penambahan umur. ?

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan yang berjudul **“Penambahan Umur Dalam Proses Perkawinan Terhadap Anak Di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa”**, maka akan diuraikan beberapa kata yang dianggap penting untuk mempermudah pembaca untuk memahami mengenai judul tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang dilandasi kasih sayang dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan akal pikiran manusia.⁷

Penambahan umur yang dimaksud penambahan umur yaitu memberikan tambahan umur pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa dikarenakan suatu senyebab, untuk kepentingan tertentu.

E. Kajian Pustaka

⁷ A. Djazuli, *Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006), h. 13-14.

Pembahasan mengenai penanaman umur dalam proses perkawinan yang dilakukan anak dibawah umur, yang belum diungkap oleh para cendekiawan dan fuqaha secara rinci dan akurat. sehingga digunakan beberapa literatur pendukung diantara lain:

1. Eb. Surbakti dalam bukunya *sudah siapkah menikah*, menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicu terbesar perceraian adalah pernikahan dini. Karena bagaimanapun, pernikahan usia muda mengandung risiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab besar sebagai sebuah keluarga.
2. M. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *indahnyan pernikahan dini*, mengemukakan bahwa menyegarkan pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesah-gesah dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika ini terjadi, orang bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan dini. Padahal penyebab utamanya bukanlah pernikahan itu, melainkan langkah yang dilakukan tergesah-gesah saat menikah.
3. Muhammad Amin Summah dalam bukunya yang berjudul *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, mengemukakan bahwa hukum keluarga dalam fiqhi dikenal dengan istilah *hukud al-a'liah* yaitu hak-hk keluarga. Yang paling mendasar bahwa masyarakat pada umumnya harus memahami hukum Islam apalagi yang berkaitan dengan perkawinan, dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan terhadap aturan yang telah ditetapkan hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.

Dari beberapa referensi yang telah dikemukakan diatas, dalam penjelasannya belum ada pembahasan yang mengupas secara terperinci mengenai judul tersebut. Akan tetapi, dari berbagai referensi diatas terdapat persamaan yang menjadi inspirasi penulis untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang terdapat dalam buku tersebut dan di samping itu pula, belum ada penulis yang membahasnya.

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji dan menemukan kebenaran suatu permasalahan di daerah tersebut diantaranya:

- a. untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penambahan umur dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari permasalahan tersebut terhadap perkembangan dan kemajuan di daerah tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya perkawinan tersebut secara terperinci

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum yaitu :

- a. Memberi sumbangsih pemikiran yang berupa gagasan secara ilmiah menurut prosedur yang berlaku serta melatih kepekaan penulis terhadap fenomena atau permasalahan yang termarginalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat

menambah pengetahuan serta wawasan untuk melengkapi dan dapat memberi informasi terhadap fenomena tersebut.

- b. Secara akademis dapat mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan jurusan penulis dan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat, terkhusus pada lembaga pendidikan formal maupun non formal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Para *mujtahid* sepakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at Islam. Orang yang sudah berkeinginan menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, yang demikian ialah lebih utama dari pada ibadah haji, sholat, jihad dan puasa Sunnah. Demikian kesepakatan para ulama.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Istilah “kawin” digunakan secara umum, hewan dan manusia dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama Islam. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penyerahan penerimaan dari pihak laki-laki).

Akad merupakan penyebab terjadinya kesepakatan atau ikatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sedangkan Al-Azhari mengatakan; akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab adalah hubungan badan. Dikatan pula bahwa, berpasangan juga merupakan salah satu makna nikah. Karena

¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Edisi. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

itu menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara Al-Farisi mengatakan, jika mereka mengatakan si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad nikah. Akan tetapi, jika dikatakan menikahi isterinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan.²

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang. Dengan kata lain, akad tersebut menjadikan hubungan yang dahulunya haram menjadi halal. Rasulullah Saw sendiri mengatakan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak sekedar akad. Tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan tersebut seorang pengantin harus merasakan indahnya akad tersebut.³

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas: Nikah (kawin) menurut arti ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ dari pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, didalamnya terkandung adanya tujuan dengan mengharapkan keridaan Allah Swt.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Cet. I Bogor: Kencana, 2003), h. 7-8.

³ Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Cet. I; Jakarta Timur: 1998), h. 396-397

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cek. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2000). h.

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini suatu yang diptetapkan Allah Swt, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً⁵

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuanya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

⁵ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah mawaddah*, dan merupakan ibadah.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.⁶ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya selama setelah masing-masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa meridai, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang rido-meridoi, dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dan hukumnya adalah halal.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia.

B. Dasar Hukum Perkawinan

⁶ Sayyid Sabiq, *Bulugul Maram* (Cet. I; Yagyakarta: 1989), h. 23.

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Para pakar ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasang. Misalnya air yang kita minum terdiri dari *Oksigen* dan *hidrogen*, *listrik ada positif ada negatif* dan sebagainya, apa yang telah dikatakan oleh para pakar ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS Al- Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan, yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung dari tingkat masalahnya, oleh karena itu, Imam Izudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu:

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan adalah wajib.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya Sunnah

Orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah Sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah tersebut adalah dari anjuran Al-Qur'an Sesuai dengan firman Allah QS An-Nur/32:24.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷

Maksudnya dari ayat di atas bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat melakukan perkawinan agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama.

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga melangsungkan perkawinan akan menelantarkan keluarganya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram, sesuai dengan firman Allah QS Ar-Rum/195:2.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ

Terjemahnya:

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...

Termasuk juga hukumnya perkawinan bila seseorang dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup untuk mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir dalam perbuatan berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apa bila melakukan pernikahan maka tidak akan menelantarkannya keluarganya, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan hanya memenuhi kesenangan bukan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Bahwa perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat*. Imam Izzudin berkata: *maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah tidak berpahala.⁸

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa perbedaan tingkatan larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat tingkatan kadarnya, keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibanding keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.

C. Batasan Umur Dalam Hukum Islam

Al-qur'an secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman QS An-Nisa/6:4.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁹

⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559.

⁹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 62.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah berkeinginan berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika calon mempelai belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang telah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas segala urusan/persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkannya mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁰

Periode baligh adalah masa kehidupan seseorang atau suatu tanda bahwa mulai masa kedewasaan, apa bila telah bermimpi basah bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan, mulainya usia baligh secara umum dapat berbeda-beda antara pendapat ulama satu dengan ulama lainnya, dikarenakan perbedaan lingkungan dan geografis. Batas awal mulainya baligh menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa wanita dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 16 tahun dan pria 19 tahun. Sedangkan di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk ulama Hanafiah yaitu apa bila seseorang telah mencapai usia 15 tahun bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

¹⁰ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah fiqih* (Jakarta: pustaka Firdaus, 1994), h. 37

Alasannya bahwa pada saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui hal yang bermanfaat dan yang bermudharat, sehingga dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.

Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa ukuran baligh adalah apabila tumbuhnya bulu-bulu di ketiak, dan usia baligh apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 15 tahun, namun Hanafi menolak bahwa sebaliknya seseorang ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu pada organ tubuh, sehingga Hanafi menetapkan batas kedewasaan seseorang laki-laki apabila telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan 17 tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *“Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya”* menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani

Kematangan jasmani berarti mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami dan isteri atau keturunannya.

2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dapat membayar emas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan perasaan/jiwa

Kematangan perasaan/jiwa maksudnya perasaan untuk menikah sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan

pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sangat cepat, pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang terang.¹¹

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu secara lahir batin. Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nuur /24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Memang dalam hukum Islam tidak di atur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal atau maksimal dalam melakukan pernikahan. Namun secara implisit syari'at Islam memberi ketentuan tersebut apabila seseorang telah mencapai usia nikah, yang dimaksud dengan usia nikah adalah jika anak telah mencapai kematangan dalam

¹¹ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 351-352.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemahan*, h. 354

segala aspek, dan dalam kitab-kitab fiqh klasik sekalipun tidak memberikan batasan umur secara pasti dan kongkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini bersifat relatif Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, maka kawinkanlah dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Dari sinilah peran orang tua dalam ikut serta membimbing dan membina kedua mempelai yang telah memulai hidup baru agar dalam proses membina keluarga baru tersebut tidak terasa berat, semua yang menyangkut kebutuhan hidup dalam berkeluarga merupakan tanggung jawab besar bagi pasangan yang baru saja menikah, terhusus pada kepala rumah tangga yang memulai memikirkan masa depan kebahagiaan dan kelanjutan rumah tangganya, sehingga berat terasa jika tanpa ada bantuan pemikiran maupun materi yang bisa meringankan beban tanggung jawab terhadap keluarganya, terkecuali jika telah memiliki finansial dan kematangan yang baik maka bisa diserahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan yang baru saja menikah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat maupun kepada pihak yang berkaitan, metode penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisis berupa fenomena atau gejala-gejala yang diamati.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan lokasi tersebut memiliki kebiasaan atau pemahaman yang keliru terhadap proses perkawinan jika dilihat dari hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku, kiranya menarik untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah sebagai bahan penelitian skripsi guna penyelesaian studi akhir perkuliahan.

B. Pendekatan Penelitian ABCD (*Assets-Based-Community-Development*)

Dalam penelitian tersebut, teknik yang digunakan dengan pendekatan yang berupa kualitatif deskriptif yang didukung oleh metode ABCD (*Assets-Based-Community-Development*). Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi tersebut, maka peneliti menggunakan metode pendekatan ABCD (*Assets-Based-Community-Development*)

Metode ABCD (*Assets-Based-Community-Development*) adalah suatu metode baru dengan metode pengembangan masyarakat yang berlandaskan pada aset dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Metode ini dikembangkan oleh Jodi Kretzmann dan John McKnight bekerjasama sama dengan kelompok-kelompok masyarakat miskin perkotaan di kota-kota besar Amerika Serikat.

Buku mereka yang berjudul “*Building Communities from the Inside Out*” (Membangun Masyarakat dari Dalam ke Luar), mendokumentasikan pengalaman penerapan metode ABCD dalam kondisi-kondisi khusus di wilayah perkotaan negara-negara barat. Namun demikian, pengalaman lain menunjukkan bahwa metode ABCD dapat pula diterapkan dengan baik dalam kondisi-kondisi khusus di wilayah pedesaan di negara-negara timur. Metode ABCD dimulai dengan mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah mereka sendiri. Kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah ini, biasanya bersumber pada:

- Masyarakat dan kegiatan-kegiatan setempat
- Kelompok dan lembaga-lembaga sosial
- Sumberdaya fisik dan usaha-usaha setempat

Setelah itu, dilanjutkan dengan pemetaan aset dan kekuatan-kekuatan masyarakat setempat. Metode ini berbeda dengan metode-metode lain yang digunakan dalam perencanaan di tingkat masyarakat yang biasanya hanya melihat pada kebutuhan dan masalah-masalah saja. Pendekatan ABCD, sebaliknya, menekankan pada kemampuan, keterampilan dan aset setempat.

Dalam penerapan metode ABCD, sangat menarik untuk diamati, bagaimana perhatian (sudut pandang) bisa berubah perlahan-lahan. Misalnya, saat membahas tentang kebutuhan, orang akan selalu merasa ‘butuh bantuan’ dan

hanya mengandalkan bantuan untuk memecahkan masalah. Namun setelah sudut pandangnya diarahkan pada aset, orang mulai berpikir tentang bagaimana caranya menggunakan apa yang sudah dimiliki untuk memecahkan masalah dan kebutuhannya dalam masyarakatnya.¹

Masyarakat pada dasarnya memiliki komunitas atau kelompok yang memiliki basis aset-aset, yang dimaksud aset adalah bagian dari kehidupan masyarakat sekeliling baik dalam bentuk kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun kemungkinan-kemungkinan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan langkah untuk menyelesaikan melalui pendekatan metode tersebut.

Metode penelitian ABCD (*Assets-Based-Community-Development*) merupakan sarana untuk melakukan pendekatan masalah yang dianggap biasa-biasa saja pada lingkup masyarakat namun memiliki potensi merugikan bagi generasi bila di biarkan, dan perlu untuk diberikan arahan dan pandangan secara khusus dan sistematis dalam penyelesaian masalah demi meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku secara berkelanjutan.

Adapun aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa diantaranya masyarakat memiliki berbagai macam potensi yang dapat diarahkan menjadi pendukung kemajuan Lingkungan tersebut yang meliputi bakat, keahlian keterampilan yang dimiliki oleh individu secara keseluruhan, selain itu ada pula aset lain seperti organisasi kepemudaan, majelis ta' lim, sanggar seni, perkumpulan peternak sapi, *kamisi'* (*perkumpulan para*

¹ Australian National University. *Program Kemitraan Masyarakat* (Update: 25 march 2014) [www.http://:chl.anu.edu.au/antropologi/kmum/programkemitraan.php](http://chl.anu.edu.au/antropologi/kmum/programkemitraan.php) (25 Aguastus 204.

warga pada setiap hari kamis), sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang mendukung.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari masyarakat seperti tokoh agama/masyarakat, keluarga penyelenggara perkawinan (orangtua mempelai), dan pihak yang melakukan perkawinan (kedua mempelai), lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Data tersier

Data yang didapatkan berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, artikel, surat kabar, koran, majalah dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan (*library research*)

Metode yang digunakan dengan bacaan maupun literatur dari berbagai referensi dengan tujuan untuk menghimpun data yang berkaitan erat terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini berupa pendapat para ahli yang relevan dengan judul yang akan diteliti.

b. Data Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang berikutnya adalah studi kasus/lapangan yang akan dilakukan di kantor kelurahan dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, penelitian tersebut untuk mendapatkan data yang akurat mengenai masalah tersebut.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.²

d. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.³ untuk mendapatkan data dibutuhkan wawancara secara langsung kepada keluarga atau orangtua bersangkutan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif yang berbentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan pengamatan lapangan, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya lebih sedikit.

² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: kencana, 2009), h. 115.

³ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. (Ed.I Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 113.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berkenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut, bahwa Desa/Kelurahan berkenan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Maka sebuah Desa/Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa/Kelurahan, maka Desa/Kelurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMDes) dan/atau RPJMK/RENSTRA ataupun Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RKPTDes/Kel).

RPJMK merupakan rencana pembangunan strategis Kelurahan dalam waktu lima tahun meliputi dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang akan mendukung perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang

memberi kesempatan kepada Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

2. Legenda Dan Sejarah Pembangunan Bulutana

Asal mula kata “Bulutana” bersal dari bahasa Makassar asli yaitu **“Bulu”** yang berarti bukit dan **“Tana”** berarti tanah. Menurut pesan leluhur atau **“Pasang Turiolo”** bahwa dulu di Kerajaan Gowa terdapat Raja yang beroposisi yang dikenal dengan nama **“Karaengta Data”** dimana dalam perjalanannya menemukan suatu kampung yang terletak diatas bukit yang sangat strategis dan dapat dijadikan benteng pertahanan dimana kampung ini bernama Bulutana yang artinya pertahanan diatas bukit. Kampung ini memang bila dilihat letak geografisnya tepat sekali dijadikan pertahanan dimana hanya ada satu jalur jalan saja untuk keluar dan masuk. Dan selanjutnya wilayah ini mengalami beberapa dekade/ tahapan perkembangan yaitu :

Tahap Pertama, (Tahun 1942). Seiring dengan perkembangan waktu, wilayah ini terbentuk menjadi suatu komunitas yang dikenal dengan rumpun **“Adat Sampulonrua”** dimana diawli dengan berdirinya tiga buah rumah adat yaitu : **1. Ballalompoa, 2. Ballajambu, 3. Ballatinggia.** (tidak diketahui siapa pediri dari ketiga rumah ini).Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk saat itu memaksa beberapa penduduk Bulutana saat itu keluar dari kampung Bulutana yang dikenal dengan **“Assulukang Sisang”** dan membentuk perkampungan baru, yaitu :**1. Bulutana 2. Palangga, 3. Bontolerung, 4. Lombasang, 5. Biroro, 6. Batulapisi dan 7. Pattapang.**

Adapun yang menjadi pimpinan pemerintahan pada waktu itu adalah : **1. TALLI, 2. KULLE, dan 3. PANGIKA'** kini beliau telah wafat (kuburannya terletak di Kelurahan Mandalle Kelurahan Bajeng) yang dikenal sebagai leluhur masyarakat Bulutana.

Tahap Kedua, (1942-1950). Pada periode ini rumpun "*adat sampulonrua*"

Bulutana ini masuk mengabdikan diri dengan Kerajaan Gowa dengan sebutan "Erangkale rigowa" yang saat itu dipimpin oleh seorang Karaeng yang urutannya antara lain: **1. BANDO, 2. GANYU bin BANDO, 3. DEKKANG bin GANYU, 4. PANGGE bin DEKKANG, dan 5. SOLLE bin GANYU.** Bersama seorang Gallarrang yang antara lain : **1. LALLA, 2. SANGGONG bin LALLA, 3. MAINTANG bin SANGGONG 4. MANRAU, 5. RAU bin MANRAU.**

Pada periode pertama dan kedua inilah berjalan bentuk pemerintahan di wilayah ini yang dikenal dengan nama "**ADAT SAMPULONRUA**" atau 12 (dua belas) orang pemangku adat yang dipimpin oleh **NOEMPA bin PANGGE** (karaeng bulu) bersama seorang Gallarrang bernama **COLENG Bin RAUF** dengan memiliki struktur organisasi antara lain yaitu :

KARAENG BULU	:Kepala Wilayah Pemerintahan/Raja
GALLARRANG BULU	:Kepala Operasional Pemerintahan
ANAK PATTOLA	:Putra Mahkota,
TAUTOWA	:Penasehat adat,dan Agama
BAKU	:Pelaksana fungsi ketertiban dan evaluasi,kinerjapemerintahan adat

ANAK JAJIANG	:Pembantu bid.pemerintahan
SANRO	:Pembantu bid.kesehatan,dan sosial.
PINATI	:Pembantu bid.Pertanian, Perdagangan
BATANGPA'JEKO	:Pembantu bid.Perdata,dan musim
JANNANG	:Bendaharawan
PALEKKA SEMPE	:Pembantu bid Perlengkapan
SURO	:Juru bicara/hubungan masyarakat

Dari Struktur pemerintahan adat tersebut di atas, pada dasarnya mereka mengemban tugas untuk melaksanakan pencapaian cita-cita (Visi-misi) yang diamanahkan dari dan oleh masyarakat Bulutana, yang dikenal dengan 4 (empat) SEBOYAN sendi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat antara lain yaitu :

Satu, PATUMBU TAU : Peningkatan sumberdaya manusia.

Dua, PAMBAUNGANG BALLA : Peningkatan sumberdaya alam.

Tiga, PATUMBU KATALLASSANG : Peningkatan kesejahteraan.

Empat, PAMOTERANG RIPAMMASENA : Sosial, budaya dan agama.

Tahap Ketiga, (1950-1980). Dengan masuknya sistem pemerintahan Belanda pada masa itu maka Bulutana yang mempunyai rumpun adat tersebut. dan merupakan bagian dari Kerajaan Gowa mengalami

perubahan sistem pemerintahan dibawah Distrik Parigi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang bernama: **GANYU bin LA'LANG** (diberi digelar Karaengbulu) bersma seorang Gallarrang bernama **MAKKA bin COLENG** dan merekapun masih eksis dalam menjalankan pemerintahan adat tersebut.

Tahap Keempat, (1981- sekarang) Kelurahan Bulutana mengalami perubahan menjadi Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong yang selanjutnya dipimpin oleh beberapa orang Lurah, dan Kelurahan Bulutana setelah mengalami pemekaran kelurahan pada tahun 2006 merupakan salah satu dari enam (6) kelurahan dan satu (1) Kelurahan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Kelurahan Bulutana terdiri atas empat (4) Lingkungan yakni: **Lingkungan Lombasang, Buttatoa, Palangga, dan Parangbugisi** juga terdiri dari 10 RK dan 21 RT. Berikut gambaran singkat tentang perkembangan kelurahan ini antara lain:

Tahun	Situasi/Peristiwa Penting
1940 - 1950an	Masa ini dipimpin oleh Noempa Bin Pangge (Karaeng Bulu'), dengan sistem Pemerintahan Belanda di bawah Kerajaan Gowa dimana struktur Pemerintahan berbentuk Distrik Parigi dan Bulutana bagian dari Distrik Parigi.
1950-1980	Masa ini dipimpin oleh Ganyu Bin La'lang (Karaeng Bulu') Bulutana sudah menjadi Kelurahan

1954	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Lombasang dan pengerjaan Pengairan Takapala I oleh PMD
1965	Lapangan Lombasang mulai dikelola sebagai sarana olahraga (sepakbola)
1966	Masjid Lombasang dibangun (sekarang Masjid Baiturrahman)
1969	Pembukaan jalan poros Malino-Majannang(Jalan Tani)
1970-1972	<p>-Dibuat Pasar Singgah di Kampung Pattapang yang pada saat itu masih menjad bagian dari Bulutana,</p> <p>-Pembuatan Jembatan Takapala, silo, dan Bangkeng ta'bing</p>
1975	Perkerasan jalan poros Malino-Palangga
1976	Lapangan di Bontoa pertama kali digunakan untuk perkemahan, yaitu Kegiatan Jambore III. Pada masa itu untuk sampai di lokasi tersebut masih berjalan kaki.
1977	<p>-Penaspalan jalan Malino-Daraha (Bontolerung)</p> <p>-Bulutana Mendapat Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan</p>
1980	-Pembuatan Instalasi Pipa Air Bersih (pipa besi) di Lombasang (bantuan UNICEF)

1981-1993	Masa ini dipimpin oleh Mustari Ago (Lurah Bulutana pertama) Bulutana menjadi Kelurahan.
1981	Dibangun Kantor Kelurahan Bulutana, dan Air Terjun Takapala dibangun oleh masyarakat
1982	5 Agustus 1982 Pertama kali dilaksanakan Turnamen sepak bola “Karaeng Bulutana Cup” di Lombasang
1985	Objek Wisata Air Terjun Takapala mulai dikelola oleh PEMDA
1984	Kelurahan Bulutana Juara I Lomba UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga)
1993-1996	Masa ini dipimpin oleh Mappatangka Dg.Talli
1996-2006	Masa ini dipimpin oleh Drs. Syamsu Alam, MM
1997	-Kelurahan Bulutana memperoleh juara I/ Kelurahan Terbaik dan TP-PKK terbaik di Sulawesi Selatan -Pembukaan jalur akses pertanian/ perkebunan di Paranglambere
1998	-Kelurahan Bulutana Juara I lomba POKMAIR
1999	-Pembuatan baru SD Paranglambere 1 Unit -Pembuatan akses jalan tani di Paranglambere
2003	-Perkerasan dan pengaspalan jalan ke Embunpagi-

	Bulutana 2 Km
2004	-Pengaspalan Jl. Pendidikan-Bulussalili – 1,5 Km
2006-sek	-Pemekaran Kelurahan menjadi 3 buah kelurahan yaitu : 1. Kel. Bulutana, 2.Kel. Bontolerung, 3. Kel. Pattapang -Dipimpin oleh Mahfuddin Gassing, SE
2007	-Kelurahan Bulutana memperoleh peringkat Juara I Lingkungan Bersih/Sehat se sul-sel -Pembangunan Irigasi Takapala II – 2 Km -Pembukaan Jalan Tani Parangtangnga-1 Km
2008	-Rehab. Irigasi Solongang Lompoa-1,5 Km -Pengaspalan jalan Pendidikan-Parangbugisi panjang 1,5 Km -Pembuatan Baru SD Parangbugisi 2 Unit
2009	-Lanjutan Pembuatan Irigasi Takapala II -Pembuatan Irigasi Tanetee – 2 KM -Rehab Lapangan Sepak bola/TribunLombasang -Pembuatan Irigasi Balleanging I- 1.5 Km -Pembuatan Baru Masjid ‘Nurul Haq’ Embunpagi

	<p>oleh Bpk.H,Ahmad Husain</p> <p>-Pembukaan Jalan tani Lombasang-Tutoro 2Km</p>
2010	<p>-Pembuatan Irigasi Balleanging II- 2 Km</p> <p>-Rehab instalasi Pipa Air Bersih di Bontoa 2 Km</p> <p>-Pembuatan Baru Masjid Parangbugisi oleh Bpk. A. Heri Iskandar ¹</p>

3. Keadaan Geografis

a. Batas Wilayah

- Sebelah utara : Kelurahan Malino
- Sebelah Timur : Kelurahan Pattapang
- Sebelah selatan : Kelurahan Bontolering
- Sebelah Barat : Kelurahan Bulutana

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kelurahan Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Kelurahan Bulutana 2170 Ha terdiri dari :

1. Hutan Lindung : 1367 ha
2. Hutan Adat : 4 ha

¹ Sumber Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama : - H. MUSTARI DG. AGO(Lurah Bulutana Tahun 1981-1993) - Drs. H. SYAMSU ALAM, MM (Lurah Bulutana Tahun 1996-2006) - MUH. TAKBIR, S.pd. MM (Tokoh Masyarakat/Pemangku adat) - Monografi Kelurahan Bulutana

- | | | |
|----|-----------|------------|
| 3. | Sawah | : 389 ha |
| 4. | Ladang | : 274,5 ha |
| 5. | Pemukiman | : 135,5 ha |

c. Jarak wilayah dari pusat Pemerintahan

Jarak dari ibu kota Kecamatan 2 km.

dari Ibu Kota Kabupaten 62 km.

dari Ibu Kota Propensi 71 km.

d. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Bulutana adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan, yang didalamnya terdapat 5 (lima) aliran Sungai, 4 (empat) titik air terjun yang dapat dijadikan objek wisata alam.

Kelurahan Bulutana berada pada ketinggian **1050 meter** dari permukaan laut.

1. **Iklim**

Iklim Kelurahan Bulutana sebagaimana Desa/Kelurahan lain di wilayah Kabupaten Gowa yaitu iklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. Suhu rata-rata 15-22 derajat Celsius.

2. **Wilayah Administrasi Pemerintahan**

Kelurahan Bulutana terdiri atas 4 (empat) Lingkungan yakni: Lingkunga Lombasang, Buttatoa, Palangga, dan Parangbugisi yang terdiri dari **10 RW** dan **23 RT** sebagai berikut :

Nama Lingkungan	Jumlah RK	Jumlah RT
Lombasang	2	6
Buttatoa	3	7
Palangga	2	4
Parangbugisi	3	6

Wilayah dari 4 (empat) Lingkungan tersebut terdiri dari :

- a. Wilayah Lingkungan Lombasang terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 6 (enam) Rukun Tetangga (RT),
 1. RK 01 Lombasang 4 (empat) RT
 2. RK 02 Mattoangin 2 (dua) RT
- b. Wilayah Lingkungan Buttatoa terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga dan 7 (tujuh) Rukun Tetangga.
 1. RK 01 Bontoa 3 (tiga) RT
 2. RK 02 Bulutanatoa 2 (dua) RT
 3. RK 03 Tanetea 2 (dua) RT
- c. Wilayah Lingkungan Palangga terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 4 (empat) Rukun Tetangga.
 1. RK 01 Palangga 2 (dua) RT
 2. RK 02 Panambungang 2 (dua) RT
- d. Wilayah Lingkungan Parangbugisi terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga dan 6 (enam) Rukun Tetangga.
 1. RK 01 Pa`bentengang 3 (dua) RT
 2. RK 02 Parasngsilibbo 2 (dua) RT
 3. RK 03 Paranglambere 1 (dua) RT

4. Struktur Organisasi Dan Pelayanan Publik

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Bulutana adalah satu kesatuan perangkat kelurahan yang terdiri atas Pejabat Lurah, Kepala Seksi dan staf, dan juga Pejabat Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari Pemerintahan Kelurahan Bulutana yang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan masyarakat.

Struktur Organisasi Kelurahan Bulutana tidak dapat lepas dari struktur administrasi Pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No. 9 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Dapat dilihat sebagai berikut:

Nama-nama Pejabat Administratif Pemerintah Kelurahan Bulutana

No	Nama	Jabatan
1	MAHFUDDIN GASSING, SE	Lurah
2	---	Sekretaris Kelurahan
	PAISYAH P	Staf / Tenaga Honorer
3	---	Kasi Pemerintahan
	SUDIRMAN	Staf / Tenaga Honorer
4	---	Kasi Pembangunan
	MUH YACUB	Staf Seksi Pembangunan
5	---	Kasi Perekonomian Dan Kesra
	DARNIATI, RAHMAWATI	Staf / Tenaga Honorer
6	---	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
	MUH RAMLI	Staf / Tenaga Honorer

NAMA KEPALA LINGKUNGAN KETUA RW / Ketua RT

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	RAMLI RUDDING	<i>Ka. LINGK LOMBASANG</i>	Lombasang
2	SYARIFUDDIN. T	KET RW 001 Lombasang	Lombasang

3	MAMANG	KETUA ORT 001 Lombasang	Lombasang
4	BASIR	KETUA ORT 002 Lombasang	Lombasang
5	SYARIFUDDIN	KETUA ORT 003 Lombasang	Lombasang
6	MUHTAR. L	KETUA ORT 004 Lombasang	Lombasang
7	ABD.LATIF LANRA	KET RW 004 Mattoangin	Mattoangin
8	M.YUNUS	KETUA ORT 001 Mattoangin	Mattoangin
9	ABD.GANI KIBO	KETUA ORT 002 Mattoangin	Mattoangin
10	H.ANWAR NAKKU	KEPALA LINGK BUTTA TOA	Embun Pagi
11	MANJA M	KETUA RW 001 Bontoa	Embun Pagi
12	PATAHUDDIN	KETUA ORT 001 Bontoa	Embun Pagi
13	CAMPE	KETUA ORT 002 Bontoa	Embun Pagi
14	SIKKIRI	KETUA ORT 003 Bontoa	Embun Pagi
15	SIKKI DABBE	KET RW 002 Bulutana	Bulutana
16	SYAMSUL.P	KETUA ORT 001 Bulutana	Bulutana
17	DATONG	KETUA ORT 002 Bulutana	Bulutana

18	ABD.RAJAB	KETUA RW 003 Tanetea	Tanetea
19	ABD RAHMAN	KETUA ORT 001 Tanetea	Tanetea
20	MUH ARIF	KETUA ORT 002 Tanetea	Tanetea
21	ABD.SAMAD TALIB	KEPALA LINGK PALANGGA	Palangga
22	AKBAR CINA	KET RW 002 Palangga	Palangga
23	ABD.LATIF	KETUA ORT 001 Palangga	Palangga
24	RUDDING. R	KETUA ORT 002 Palangga	Palangga
25	SULEMAN DEKU	KET RW 004 Panambungan	Palangga
26	NINE	KET ORT 001Panambungan	Palangga
27	JIDONG	KET ORT 002Panambungan	Palangga
28	JUFRI SEMBO	Ka LINGK PARANGBUGISI	Parangbugisi
29	MATTAYANG	KET RW 001 Pa`bentengan	Parangbugisi
30	ARIF NASANG	KET ORT 001Pa`bentengan	Parangbugisi
31	ABD.GANI	KET ORT 002Pa`bentengan	Parangbugisi
32	CACO NAHA	KET ORT 003Pa`bentengan	Parangbugisi
33	HAMARUDDIN NABA	KET RW 002 Parangsilibbo	Parangsilibbo
34	MANI. L	KET ORT 001Parangsilibbo	Parangsilibbo

35	GODO. T	KET ORT 002Parangsilibbo	Parangsilibbo
36	SAMADO MUSA	KET RW 003 Paranglambere	Paranglambere
37	NURU MUSA	KET ORT 001Paranglambere	Paranglambere

SUSUNAN ORGANISASI LPM

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	H.ABD.GANI SEKE, Spd	KETUA	Lombasang
2	AMIR SELLE	SEKRETARIS	Lombasang
3	HJ.SAHARIAH	BENDAHARA	Embun Pagi
4	M.SAID JUMA	SEKSI AGAMA	Palangga
5	ZAINAL MAJJO	SEKSI KEAMANAN/ KETERTIBAN	Embun Pagi
6	M RAMLI RUDDIN	SEKSI PEMB, PEREKONOMIAN DAN PERKOPERASIAN	Lombasang
7	SYAMSUDDIN R. SPdi	SEKSI PENDIDIKAN	Palangga
8	ASPAR DG NGOYO A.Mk	SEKSI KESEHATAN	Lombasang
9	SALEH NOMPO	SEKSI KEPENDUDUKAN/ KB	Embun Pagi

10	AMIR TOMPO	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP	Lombasang
11	SYARIFUDDIN TUJU	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA	Lombasang
12	H.MAMANG	SEKSI KESATUAN BANGSA	Palangga
13	HASNIAH AMIR	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Lombasang

TOKOH MASYARAKAT :

1. H. SYAIFUDDIN, S.PD

2. M. SALEH SILI

3. H. NGAI RASSI

4. H. BAGA

5. HASBULLAH AZIS

6. EMPO TOKU

7. AMIR TOMPO

8. SIMBURU

9. A. KHALIK NAWIR

10. ABDULLAH BOLE

11. ABD. HAMID MANDA,

S.PD

4. H. ABD. HAMID SARRO,

BA

TOKOH ADAT :

1. SYAMSU ALAM, SE

2. AMIR SELLE

3. CACCA BULENG

4. M. SAID JUMA

5. BASRI MANDE

6. M. TAKBIR, S.Pd., MM

SESEPUH MASY.ADAT :

1. H. MUSTARI AGO

2. H. TALLA

3. H. SYAHRUDDIN DG.

LURANG

NAMA IMAM LINGKUNGAN dan RAWATIB MASJID

No	Nama	Jabatan	Alamat
	SYAHRUDDIN DG.LURANG	IMAM LINGK LOMBASANG	Lombasang
	BACHTIAR CACO	IMAM LINGK BUTTA TOA	Embun Pagi
	M. SAID JUMA	IMAM LINGK PALANGGA	Palangga
	RABA BERU	IMAM LINGK PARANGBUGISI	Parangbugisi
IMAM RAWATIB / MASJID			
	M.NATSIR NYAMPA	IMAM MASJID BAITURRAHMAN	Lombasang
	ABDULLAH	IMAM MUSHOLLAH AL IKHLAS	Lombasang
	SALEH NANGGO	IMAM MASJID NURUL HAQ	Embun Pagi
	JAMALUDDIN	IMAM MASJID NURUL JANNAH	Bulutana
	RANI	IMAM MASJID UHUWA ISLAMIAH	Tanetea
	HASBULLAH	IMAM MASJID NURUL HIDAYAH	Embun Pagi
	M.SALEH LEMANG	IMAM MASJID NURUL IMAN	Palangga
	H.ABDUL RAHIM SONDO	IMAM MASJID BAITURRAHIM	Panambunga ng
	H ZAINAL DOLA	IMAM MASJID NURUL JABAL	Parangsilibb o

	RABA BERU	IMAM MASJID ALAUDDIN	Parangbugisi
	SALEH CACO	IMAM MUSHOLLAH ATTAUHID	Bulussalili
	P. DUDDING	IMAM MASJID NURUL ALAM	Parang lambere

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERA KELUARGA
(TP-PKK)
KELURAHAN BULUTANA**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	NY. MARLINA MAHFUDDIN,SKM	KETUA	Embun Pagi
2	NY. HASNIAH AMIR	WAKIL. KETUA	Lombasang
3	NY.AMINAH JAFAR	SEKRETARIS	Lombasang
4	NY,DARNIATI SYARIFUDDIN	WAKIL SEKR	Bulutana
5	NY.KARTINI RAMLI	BENDAHARA	Lombasang
6	RAMAYANTY,SE	WAKIL BEND	Bulussalili
7	Ny.SUJIRAH BAHARUDDIN	Ketua POKJA I	Palangga
8	NY.DRA.ROSDIANA NURDIN	Ketua POKJA II	Tanetea
9	NY.MARDIANA ARSYAD	Ketua POKJA III	Tanetea
10	NY.HASNIAH SAID	Ketua POKJA IV	Palangga

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM

No	Nama	Jabatan	Alamat
I	LINGKUNGAN LOMBASANG		
1	NY MARIANI HAMID	KETUA	Lombasang
2	NY SURIANI AHYAR SAHAMONI	WAKIL KETUA	Lombasang
3	NY KARTINI RAMLI	SEKRETARIS	Lombasang
4	NY MARIATI ASPAR	BENDAHARA	Lombasang
II	LINGKUNGAN PALANGGA		
1	Ny.Hasniah said	KETUA	Palangga
2	Ny Satria Tante	WAKIL KETUA	Palangga
3	Ny Budiati	SEKRETARIS	Palangga
4	Ny Ernawati	BENDAHARA	Palangga
III	LINGKUNGAN BUTTATOA		
1	NY. HARTINI LASALEH	KETUA	Embun Pagi
2	NY. SYAMSINAH EDI	WAKIL KETUA	Embun Pagi
3	NY. MARTINI SALEH	SEKRETARIS	Embun Pagi
4	NY. MARIATI BASRI	BENDAHARA	Embun Pagi
IV	LINGKUNGAN PARANGBUGISI		
1	NY. SURIANI MUIS	KETUA	Bulussalili
2	NY. MAEMUNAH	WAKIL KETUA	Bulussalili

3	NY. SARIBANONG	SEKRETARIS	Bulussalili
4	NY. MARYAM	BENDAHARA	Bulussalili

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

No	Nama	Jabatan	Alamat
I	LINGKUNGAN LOMBASANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) “MELATI”		
1	NY. HASNIAH AMIR	KETUA	Lombasang
2	NY. DARNIATI SYARIFUDDIN	SEKRETARIS	Bulutana
3	NY. RATNA SYAMSUDDIN	BENDAHARA	Lombasang
4	NY. HARTINI SALEH	ANGGOTA	Embun Pagi
5	NY. MARWATI	ANGGOTA	Lombasang
II	LINGKUNGAN PALANGGA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) “SEJAHTERA I”		
1	NY. HASNIAH SAID	KETUA	Palangga
2	NY. SUBAEDAH	SEKRETARIS	Palangga
3	NY. NURHAEDAH TAHIR	BENDAHARA	Palangga
4	NY. SUMIATI NURDIN	ANGGOTA	Palangga
5	NY. TINI SUDDING	ANGGOTA	Palangga
III	LINGKUNGAN PARANGBUGISI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) “BAJI PAMAI”		

1	NY. SUHRIAH	KETUA	Parangsilibbo
2	NY. HASNI GANI	SEKRETARIS	Parangbugisi
3	NY. MARYAM SERANG	BENDAHARA	Parangsilibbo
4	NY. SARINTANG	ANGGOTA	Parangsilibbo
5	NY. HASNAH	ANGGOTA	Parangsilibbo
IV	LINGKUNGAN BUTTATOA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) “ ”		
1	Bergabung dengan Lingk.Lombasang	KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		BENDAHARA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SINOMAN
TINGKAT LINGKUNGAN 21/07/2012

No	Nama	Jabatan	Alamat
I	SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SINOMAN TINGKAT LINGK. <u>LOMBASANG</u>		
1	MARIATI MINGGU	KETUA	Mattoangin
2	UMMIATI PANJA	WAKIL. KETUA	Lombasang
3	SURIANI AHYAR	SEKRETARIS	Lombasang

4	MARIANTI	WAKIL SEKR	Lombasang
5	SUKIANG LATIF	BENDAHARA	Lombasang
6	USRIANI	WAKIL BENDAHARA	Lombasang
II	SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SINOMAN TINGKAT LINGK. <u>BUTTATO</u>		
1	NURHAYATI SITUJU	KETUA	Embunpagi
2	ROSMIATI	WAKIL. KETUA	Embunpagi
3	IRAWATI SYAMSUDDIN	SEKRETARIS	Embunpagi
4	IRAWATI SENG	WAKIL SEKR	Embunpagi
5	ASRIANI	BENDAHARA	Embunpagi
6	SATRIA BACO	WAKIL BENDAHARA	Embunpagi
III	SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SINOMAN TINGKAT LINGK. <u>PALANGGA</u>		
1	HADRAH	KETUA	Palangga
2	SUMIATI	WAKIL. KETUA	Palangga
3	HABIBAH	SEKRETARIS	Palangga
4	HASNIATULLAH	WAKIL SEKR	Palangga
5	SABIAH	BENDAHARA	Palangga
6	SATRIANI IWAN	WAKIL BENDAHARA	Palangga
IV	SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SINOMAN TINGKAT LINGK. <u>PARANGBUGISI</u>		
1	SALMA ZAENAL	KETUA	Parangbugisi

2	HAJRAH	WAKIL. KETUA	Parangbugisi
3	SARIBANONG	SEKRETARIS	Parangbugisi
4	SARINTANG	WAKIL SEKR	Parangbugisi
5	ASRIANI MULIADI	BENDAHARA	Parangbugisi
6	ASNI. G	WAKIL BENDAHARA	Parangbugisi

C. KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Bulutana terdiri atas 609 KK dengan total jumlah jiwa 2300 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

5. KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Bulutana terdiri atas 609 KK dengan total 2300 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Data hasil sinkronisasi pendataan Pemerintah

Kelurahan Bulutana dengan BPS. 2009

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	1.141 Jiwa	49,6 %
2	Perempuan	1.159 Jiwa	50,3 %

T o t a l	2.300 Jiwa	100 % ²
-----------	------------	--------------------

Berkaitan dengan data penduduk pada saat ini terlihat dari laporan hasil sensus Kader PPKBD dan Dasawisma dalam rangka penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) pada akhir Bulan oktober 2010 dengan menggunakan alat kajian dengan system Penjajakan pendataan langsung di masyarakat dan di jadikan sebagai Bank Data Kelurahan, untuk kepentingan pembangunan masyarakat, perkembangan penduduk Kelurahan Bulutana yang setiap bulan disampaikan pada Pemerintah Kabupaten melalui Kantor Camat Tinggimoncong, maka dapat diketahui jumlah penduduk menurut kelompok Umur, jenjang pendidikan, masing-masing Sebagaimana data di bawah ini yaitu:

1. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Kelurahan Bulutana Tahun 2010

No	Umur	L	P	Jumlah	Presentase %
1	0 – 5 Tahun	85	115	200	8,74 %
2	6 – 10 Tahun	122	160	282	12,32 %
3	11 – 15 Tahun	103	99	202	8,83 %
4	16 – 20 Tahun	96	84	180	7,87 %
5	21 – 25 Tahun	84	98	182	7,96 %

² Data Kec. Tinggimoncong dalam angka, Badan Pusat Statistik Kab. Gowa 2009 dan Data Kader PPKBD dan Dasawisma Oktober 2010.

6	26 – 30 Tahun	98	96	194	8,48 %
7	31 – 35 Tahun	97	87	184	8,04 %
8	36 – 40 Tahun	65	74	139	6,08 %
9	41 – 45 Tahun	92	95	187	8,17 %
10	46 – 50 Tahun	109	80	189	8,26 %
11	51 – 55 Tahun	93	81	174	7,61 %
12	55 Tahun dst.	97	90	187	7,68 %
Total		1.141	1.159	2.300	100 %

2. Jumlah Penduduk menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kelurahan Bulutana Tahun 2010.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase dari jumlah Penduduk
1	Tamat Sekolah SD	357	15,60 %
2	Tamat Sekolah SLTP	162	7,08 %
3	Tamat Sekolah SLTA	174	7,61 %
4	Tamat Ak. /Perg Tinggi	57	2,50 %
5	Masih Sekolah	464	20,28 %

T o t a l	1.214	53,04 %³
------------------	--------------	----------------------------

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata Pencarian sebagian besar penduduk di kelurahan ini bekerja sebagai Petani dan peternak, sehingga bidang pertanian dan peternakan menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduknya. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencarian penduduk.

Jumlah penduduk Menurut Mata Pencarian

Kelurahan Bulutana Tahun 2010

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Presentase dari jumlah penduduk
1	Pegawai Pemerintah	61	2,67 %
2	Pegawai Swasta	23	1,01 %
3	Wiraswasta (Usaha sendiri)	265	11,58 %
4	Petani/Peternak	905	39,54 %
5	Pedagang	30	1,32 %
6	Pensiunan	36	1,58 %
Jumlah		1320	57,67 %

³ Data Kader PPKBD dan Dasawisma Oktober tahun 2010

4. Tingkat Kesejahteraan

Untuk mengetahui lebih jauh tentang tingkat kesejahteraan keluarga penduduk Kelurahan Bulutana dapat dilihat melalui data kader PPKBD dan dasawisma yang ada pada saat ini. Berikut perbandingan jumlah rumah tangga/ keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera yaitu. :

Jumlah Keluarga menurut Kategori Sejahtera dan Prasejahtera

Kelurahan Bulutana Tahun 2010

Pra Sejahtera	Sejahtera			Sejahtera Plus	Total
	I	II	III		
150 KK	152 KK	127 KK	174 KK	6 KK	609 KK ⁴

5. Sarana Dan Prasarana

Sarana Umum

Jalan	Panjang
Aspal	6,5 KM
Batu-Sirtu/perkerasan	3,5 KM
Rabat	1,5 KM
Setapak/ Tani/ Tanah	8,5 KM

Sarana Transporta

Jalan	Panjang
Propinsi	- KM
Kabupaten	6 KM
Kelurahan	18 KM

⁴ Sumber: Data Kader PPKBD-Posyandu Se Kel. Bulutana

Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar	- buah
Lapangan	3 buah
Rumah adat	2 buah
Balai Pertemuan	1 Buah

Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	2 buah
SD	4 buah
SMP/Tsanawiyah	1 buah
SMA/Aliyah	1 buah

Sarana Ibadah

Sarana	Jumlah
Masjid	10 buah
Mushallah	2 buah
Pura	- buah
Gereja	- buah

B. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Proses Penambahan Umur Dalam Perkawinan.

1. Pengertian perkawinan dibawah umur

Pernikahan dibawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dibawah umur/usia dini adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang

belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang yang mengaturnya. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.⁵

Sedangkan pernikahan dibawah umur dalam perspektif fiqh adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan dibawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ulama fiqh, dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifa.⁶

Adapun hukum melakukan pernikahan dibawah umur, menurut mayoritas ulama fiqh Ibnu Mudzir menyatakan sebagai ijma' ulama fiqh mengesahkan perkawinan dibawah umur. Menurut para ulama, untuk masalah perkawinan kriteria baligh dan berakal bukan me

rupakan persyaratan keabsahannya, beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:⁷ Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih belia. Dalam sebuah hadis disebutkan: *“sesungguhnya Nabi mengawini (Aisyah) pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada saat usia 9 tahun dan hidup bersama selama 9 tahun”*. Riwayat Al-Khamsah, Imam

1. Proses penambahan umur dalam perkawinan

Praktik penambahan umur bisa juga disebut dengan pemalsuan umur, di Lingkungan Palangga terjadi karena adanya suatu kebiasaan yang menyepakati atau bersepakat antara tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap biasa dilakukan dengan pihak yang akan melangsungkan perkawinan, meski sudah ada

⁵ Mohammad Asmawi, *nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darusalam, 2004), h. 87.

⁶ Imam Alaudin Al-kasant Abu Bakar Bin Mas'ud, *Badai'al Shanai* (Juz III; Kairo: Dar Al-Hadits, 1426/2005 M).

⁷ Muhammad Husein, *fiqh Perempuan: Refleksi Kyat Atas Wacana Agama Dan Gender* (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 68.

peraturan yang melarang perbuatan tersebut, namun proses penambahan umur dalam pernikahan tetap masih terjadi karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Praktik penambahan/pemalsuan umur dalam pernikahan ini bisa terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Keluarga dari pihak mempelai tersebut datang sebagai pihak yang berkepentingan kepada sesepuh kampung untuk bermusyawarah. Kedatangan keluarga bertujuan meminta pertolongan dengan perihal untuk dapat segera menikahkan kedua calon mempelai dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah pihak keluarga sudah hamil diluar nikah atau sebab yang lain. Karena rasa solidaritas tinggi maka pemalsuan umur pun disepakati.
2. Petugas sebenarnya mengetahui betul tentang prosedur yang harus dilalui bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Prosedur yang seharusnya dilalui oleh pasangan tersebut, maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun pada kenyataan hal itu dikesampingkan oleh oknum-oknum tertentu yang berkepentingan.

Sebenarnya jika masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana proses perizinan mengenai pernikahan usia dibawah umur maka akan mudah kiranya hukum untuk ditegakan di masyarakat tersebut. Secara rinci syarat-syarat perkawinan di bawah umur akan diuraikan diantaranya sebagai berikut: ⁸

1. Para pihak mengajukan perkawinan terlebih dahulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Dari KUA diberi formulir untuk di isi dan kemudian diajukan pada Pengadilan Agama

⁸ Penejelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974

3. Menunggu penetapan dari Pengadilan Agama dan dengan berbagai sidang
4. Menyerahkan izin kepada Kantor Urusan Agama (KUA) jika telah di dapatkan dan jika tidak maka perkawinan dibatalkan.

Dengan demikian, selain syarat-syarat melangsungkan perkawinan secara umum, khusus dalam persyaratan umur bagi pelaku perkawinan dibawah umur di Indonesia adalah mendapatkan izin dari pengadilan agama (PA) dan kantor urusan agama (KUA), karena keduanya adalah lembaga yang dapat memberikan izin dispensasi tersebut. Namun demikian umumnya harus mendapatkan penetapan izin terlebih dahulu dari pengadilan agama dimana mereka hendak melangsungkan perkawinannya. Dan untuk pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Dengan catatan bahwa syarat-syarat secara keseluruhan telah terpenuhi, termasuk di dalamnya adanya syarat-syarat mendapatkan izin dari pengadilan agama setempat. Dari persyaratan yang telah disebutkan, setidaknya memberikan kelonggaran kepada hakim yang sedang dimintakan izin untuk mengabulkan permintaan kawin dari calon mempelai baik dari laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur.

Dari pemaparan diatas mengenai proses perizinan menikah dibawah umur, cukup sulit dengan kurangnya pemahaman tersebut, sehingga masyarakat awam yang tinggal di daerah pedesaan bingung harus memulai dari mana. Masyarakat di Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa belum semuanya mengetahui tentang peraturan mengenai batasan umur dalam pernikahan dan prosedur yang harus dilakukan apabila ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Ketika keluarga diminta keterangan oleh peneliti mengenai proses pernikahan bagi pasangan yang menikah dengan cara tersebut, orangtua

mengatakan “Yang terpenting sudah sah menurut agama”.⁹ Menurut pemahaman masyarakat bahwa buku nikah itu hanya sebagai bukti tertulis. Jadi pernikahan tersebut tetap sah menurut mereka”. Bagi pasangan yang menikah dengan cara tersebut cara untuk mendapatkan buku nikah, keluarga memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu, mereka menyebutnya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang di berikan. Namun ada juga pasangan yang mendapatkan buku nikah dengan proses yang sama tanpa harus memberikan uang tambahan.

Mengenai permasalahan ini sebenarnya ada sangsi jika ada pelanggaran terhadap proses pernikahan di bawah umur tersebut, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab IX yang terdapat ketentuan pidana diantaranya pasal 45 yaitu :

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10, ayat (3) , 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tuju ribu limaratus rupiah).
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu imaratus rupiah).
3. Tindak pidana yang di maksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.¹⁰

Dalam Praktik pemalsuan umur tersebut, dari pengakuan masyarakat yang terkait dengan masalah ini, terdapat campur tangan dari beberapa pejabat yang menangani langsung mengenai proses penambahan umur. Dari sini jelas

⁹ Hasil wawancara dengan orangtua mempelai laki-laki Aspar Sadik di Desa Embunpagi Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V. Jakarta: UI-Press, 1986), h. 186.

tergambar sikap tidak jujur bagi pejabat Negara yang mengemban amanah, kenyataannya Undang-undang tidak sepenuhnya dijalankan. Terbukti dengan masih saja terjadi Praktik pemalsuan umur dalam perkawinan di masyarakat.

C. Penambahan Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (1) disebutkan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Undang-undang tersebut merupakan landasan pokok dari hukum perkawinan. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan pendekatan lahir dan batin itu dimaksudkan bahwa suami dan isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, dengan makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu ikatan formal saja tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin yang berupa cinta dan kasih sayang, sehingga perkawinan dalam Undang-undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dan wanita, akan tetapi mengandung aspek-aspek lainnya yaitu aspek agama, biologis, sosial dan juga masyarakat.

Sehingga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 141.

pernah ada. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu ikatan kepada seseorang, karena tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama dan negara.¹²

D. Pandangan Masyarakat Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa Dalam Memahami Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Masyarakat Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana mendiami daerah puncak yang terletak di Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, daerahnya dingin dan sejuk dikarenakan sekeliling desa tersebut dikelilingi oleh lembah dan pegunungan hijau, bahasa yang di gunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar secara umum namun ada juga campuran yang menggunakan bahasa Bugis dan Konjo, Berbicara tentang perkawinan, sebuah ungkapan dalam bahasa Makassar yang menyinggung tentang perkawinan berbunyi ” *Tenapa na ganna se're tau punna tenapa na situtu ulunna na salanggana*” yang berarti: seseorang belum sempurna menjadi manusia jika kepala dan bahunya belum menyatu.

Ungkapan di atas bermakna bahwa perkawinan di desa tersebut dianggap sebagai proses menyatukan umat manusia menjadi bagian yang utuh adalah sebuah kesakralan. Suami dan isteri dianggap sebagai sebuah bagian kepala dan bahu yang harus disatukan, anak gadis atau perjaka jika belum menikah belum dianggap sebagai *tau* (manusia). Mereka belum punya hak untuk berbicara pada

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Figh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 141.

acara-acara tertentu, perkawinan membuat mereka kemudian mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih dimata masyarakat.

Bila seseorang mengawinkan anaknya maka orang-orang akan menganggap telah dilepas selubungnya. Orang-orang yang belum mengawinkan anaknya dianggap sebagai orang yang masih tertutup selubung, maksudnya menutupi sesuatu yang perlu di hawatirkan yang berupa kehormatan keluarga. Karena itu acara perkawinan digelar meriah sebagai gambaran kegembiraan orangtua mempelai karena selubung akan segera terlepas.

Mencari jodoh untuk anak bukan perkara mudah karena berarti menghubungkan antara dua keluarga, yang berkaitan dengan masa depan rumah tangga dan keluarganya. Dua keluarga yang berhubungan karena perkawinan akan menjaga kehormatan bersama-sama. Orang yang tidak menikah dianggap tidak memiliki garis keturunan. Sementara orang yang mempunyai banyak anak berarti memiliki banyak rejeki, inilah salahsatu kepercayaan oleh masyarakat tersebut yang dipegang. Sehingga jika anak-anaknya hanya tinggal dirumah dan belum menikah maka orangtua merasaa malu.

Pandangan masyarakat Lingkungan Palangga dalam memahami Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masa usia muda banyak di antaranya yang tak paham mengenai aturan tentangnya maupun prosedurnya, ini dikarenakan masyarakat di desa tersebut masih terbelakang mengenai pendidikan dan wawasan mengenai hal demikian, bahwasanya aturan tentang perkawinan yang mengharuskan pencatatan setiap pernikahan di kantor urusan agama (KUA), yang dimaksud dalam pencatatan perkawinan adalah harus sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun aturan dan harapan yang dimaksud dalam pasal maupun Undang-undang tidak tercermin pada masyarakat tersebut dalam prosesi perkawinan.

Lebih tegasnya bahwa proses perkawinan itu harus tunduk kepada Undang-undang yang ditetapkan pemerintah sebagai hukum positif. Namun demikian apa yang diharapkan dan apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang agar dapat tercapai secara keseluruhan agar dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku bagi negara dan agamanya dan juga mentaati ketentuan-ketentuan yang menjadi ketetapan, ketentuan-ketentuan diatas rupanya belum bisa di pahami secara baik oleh masyarakat pada umumnya.

Masyarakat yang berada pada daerah perkampungan atau pedesaan umumnya lebih menggunakan aturan adat kebiasaan yang secara turun temurun telah menjadi ritual yang tidak bisa ditinggalkan karena masyarakat di daerah tersebut memiliki prinsip-prinsip dalam hal pernikahan. Pertimbangan terbesar dalam mencari jodoh adalah masalah “*kasiratangngang*” atau kesepadanan. “*Kasiratangngang*” adalah kesejajaran atau kesepadanan dalam tatanan sosial masyarakat.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang di laksanakan pada usia muda yang menurut ketentuan hukum perkawinan melanggar aturan Undang-undang perkawinan yaitu perempuan minimal berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Pernikahan pada usia tersebut merupakan bentuk kebiasaan yang sudah mengakar yang dilakukan oleh masyarakat.

Pernikahan dibawah umur dengan menambahkan umur merupakan bentuk perilaku yang sudah membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan menikah terhadap anak di bawah umur harus di tinjau dari sisi kesiapan dan kematangan usia anak dalam melangsungkan pernikahan. Pada masyarakat Lingkungan Palanggadan sekitarnya suatu pernikahan yang terjadi pada usia tersebut lebih dikarenakan adanya dorongan rasa kemandirian dari perempuan maupun dari laki-laki yang menginginkan menikah muda. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut;

Sitojengna nakke tettereka a'bunting nasaba' tena naku ero' ku susai tau toaku, na saba' ku kamaseangi tau toaku punna angjoreng tallasakku, nasaba' tau toaku toami jari iaminjo naku buntingka eroka anringaungi susana tau toaku siagang ambantu tau toaku.

*"Sebenarnya saya menikah lebih cepat supaya tidak tergantung orangtua lagi, karena kasian kalau terus bergantung dengan orangtua karena orangtua saya sudah lanjut usia jadi kalau sudah nikah bisa meringankan beban orangtua dan bisa bantu orangtua"*¹³

Selain alasan kemandirian. pernikahan juga terjadi karena mengandung unsur perbaikan sosial ekonomi keluarga karena masyarakat berpendapat bahwa

¹³ Miftahul Jannah (33 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara Di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa, 28 Februari 2014.

dengan menikah muda seorang perempuan akan memperoleh perbaikan ekonomi keluarga. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

I nakke a'bunting na saba' barang ku kulle tallasakku, erokka assikola ingka tau toaku tena pakullena angongkosi nasaba' kaniak inja andikku cakdi-cakdi napa sikola inja.

"saya nikah supaya bisa hidup mandiri dan bisa bantu-bantu keluarga, mau melanjutkkan sekolah tapi orangtua tidak bisa membiayai apalagi saya masih punya adik yang masih kecil-kecil yang sementara sekolah".¹⁴

Secara umum Pernikahan di usia muda banyak yang beralasan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga karena keluarga tidak mampu memberikan keidupan yang lebih layak, pola pikir masyarakat tersebut ada kaitanya dengan faktor rendahnya tingkat pengetahuan/pendidikan dan rendahnya ekonorni keluarga dimana orangtua tidak memiliki kemampuan atau pilihan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, sarana dan prasarana sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya terlebih lagi bagi anak perempuan. Faktor tersebut berdampak pada kehidupan sosial terhadap generasi muda yang sebenarnya memiliki potensi yang lebih baik dimasa depan, hingga kini kebanyakan dari masyarakat tidak memikirkan resiko jangka panjang yang akan di alaminya.

Kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut memiliki pola pemikiran dan kepercayaan secara turun-temurun yang dianggap sebagai warisa nenek moyang yang mesti di jaga dan di lestarikan hal ini merupakan sarat dengan prinsip dan nilai-nilai adat. Mereka yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut adalah cerminan dari seorang manusia yang dapat memberikan

¹⁴ Wulan Sari (21 Tahun), Ibu Rumahtangga, Wawancara, Di Lingkungan Embunpagi, 20 Maret 2014.

keteladanan dan membawa norma dan aturan sosial. Jika pemahaman ini tidak berubah pola pikir mengenai hukum yang telah ditetapkan agama dan hukum Islam maka generasi muda yang menjadi harpan bangsa dan budaya akan tengelam dalam kemajuan teknologi dan kemoderenan apa lagi yang menyangkut tentang Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang menjadi landasan dalam aturan pernikahan yang dapat mempengaruhi kemajuan desa tersebut.

Perkawinan dalam masyarakat adat adalah salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Bentuk budaya ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komunitas masyarakat tertentu. Hal ini bisa terlihat pada tata cara dan pelaksanaannya, begitupula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut. Berikut jenis adat perkawinan yang biasa dilakukan dan yang terjadi di masyarakat setempat di antaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peminangan (massuro)

Perkawinan seperti ini berlaku secara turun-temurun bagi masyarakat Bugis/Makassar yang bersifat umum, baik dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa. Perbedaanya hanya dari tata pelaksanaannya. Bagi golongan bangsawan melalui proses yang panjang dengan upacara adat tertentu, sedangkan masyarakat awam berdasarkan kemampuan yang dilaksanakan secara sederhana.

2. Perkawinan *silariang* (kawin lari)

Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan peminangan akan tetapi kedua belah pihak melakukan mufakat untuk lari dari rumah penghulu atau kepala kampung untuk mendapatkan perlindungan dan selanjutnya diurus untuk dinikahkan.

Dalam masyarakat bugis atau makassar peristiwa *silariang* (melarikan diri untuk dinikahkan) adalah perbuatan yang mengakibatkan *“siri”* bagi keluarga perempuan. Dahulu peristiwa semacam ini bagi pihak perempuan yang disebut *“tomasiri”* selalu berusaha untuk menegakkan harga diri atau *“siri”* dengan cara membunuh laki-laki yang melarikan anak gadisnya. Namun, sekarang ini menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah anggota adat atau penghulu (pemerintah) maka ia tidak bisa diganggu lagi. Penghulu atau anggota adat harus berusaha dan berkewajiban mengurus dan menikahkannya.

Untuk maksud tersebut maka diadakanlah komunikasi kepada orangtua perempuan *“to masiri”* untuk dimintai persetujuannya tetapi sering juga terjadi orangtua dan keluarga pihak perempuan tidak mau memberi persetujuannya, karena merasa dipermalukan *“ri pakasiri”*. Bahkan orangtua yang dipermalukan (*ri pakasiri*) itu menganggap anaknya yang dilarikan itu telah meninggal dunia dan tidak lagi diakui sebagai anaknya *“massakkarengngi ana’na”*. apabila hal ini terjadi maka jalan lain yang ditempuh adalah pihak adat atau penghulu menikahkannya dengan istilah wali-hakim.

Akan tetapi walaupun keduanya telah dinikahkan, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tetap berbahaya. Oleh karena itu, selama keduanya belum diterima kembali oleh keluarga maka haruslah berhati-hati

3. Perkawinan menurut usia

Telah diketahui bahwa usia perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar kedua calon mempelai tersebut memiliki kematangan dalam berumah tangga, agar dapat

memenuhi tujuan luhur dari suatu perkawinan yaitu mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sebelum adanya Undang-undang perkawinan, usia perkawinan tidak ada pembatasan sehingga sering terjadi anak dibawah umur dinikahkan *botting 'ana-ana'*. walau keduanya telah menikah namun tetap tinggal di rumah orangtua masing-masing. Ketika keduanya telah aki-baliq (menganjak dewasa) barulah dipertemukan untuk hidup sebagai suami isteri. namun hal tersebut tidak terjadi terhadap generasi masa kini justru yang ada adalah sebaliknya.

4. Perkawinan yang dilarang

Sejak dahulu adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis/Makassar melarang perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, seperti:

- a. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkannya (ibu atau nenek) baik melalui ayah atau ibu.
- b. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurun dirinya (anak/ cucu/ cicit) termasuk keturunan anak wanita.
- c. seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keturunan ayah atau ibu (saudara kandung atau nak dari saudara kandung)
- d. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara yang menurunkan (saudara kandung ayah/ saudara kandung ibu/ saudara kakek atau nenek baik dari ayah maupun dari ibu.

Dari hal tersebut, berarti seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah tanpa batas, apabila hal

ini terjadi maka oleh masyarakat Bugis/Makassar merupakan peristiwa atau perbuatan haram menurut ajaran Islam. Namun pada kenyataanya, perkawinan yang demikian sering terjadi di masyarakat.

Semakin cepat anak menikah, maka makin tinggi martabat orangtua sebab dianggap mampu mengontrol anaknya. Nilai virginitas di masyarakat yang tinggi menyebabkan para orangtua menikahkan anak perempuannya di usia muda, sebab anak perempuan yang masih muda umurnya dan perawan dianggap memiliki 'harga' yang tinggi bagi orangtua.

Ada juga persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan yang lambat menikah ditakutkan akan menjadi 'perawan tua'. Jika anak perempuan dilamar di usia muda, orangtua akan merasa bangga, sebab beban untuk menghidupi anak sudah tidak menjadi tanggungan atau beban orangtua lagi.

Menurut pendapat masyarakat mayoritas, pendidikan seks dianggap masih tabu untuk dibicarakan jika belum menikah karena dapat menstimulasi anak untuk melakukan hubungan seks. Padahal tujuannya adalah agar anak mampu mengontrol tubuhnya dalam faktor biologis. Faktor tersebut perlu adanya sosialisasi baik dinas pendidikan maupun pihak pemerintah dan aparat desa setempat yang dapat memberikan arahan dan pengetahuan, agar tercipta keamanan dan stabilitas, demi kemajuan desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses penambahan umur dalam perkawinan terhadap anak dibawah umur disebut juga dengan pemalsuan umur, hal ini karena adanya suatu kebiasaan yang menyepakati atau bersepakat diantara sesepuh-sesepuh masyarakat yang dianggap biasa di lakukan secara turun temurun, meskipun sudah ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Umumnya masyarakat di Lingkungan Palangga Kel. Bulutana Kab. Gowa tidak mengetahui tentang peraturan tersebut di akibatkan karena terbelakangnya sarana pendidikan, ekonomi dan transportasi.
2. Pernikahan dibawah umur atau sering disebut dengan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang belum mencukupi umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang mengaturnya. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.
3. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkwinan bahwa laki-laki dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun di sisi lain undang-undang memberi dispensasi bagi pasangan yang ingin segera menikah di bawah umur dengan alasan

dan pertimbangan yang dapat dipertimbangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah mendapatkan izin orangtua dan mendapatkan izin dari pengadilan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

B. *Saran-Saran*

1. Untuk kemajuan Lingkungan Palangga Kelurahan Bulutana Kabupaten Gowa, perlu adanya usaha nyata bagi seluruh aparaturnegara terkhusus yang berada di Lingkungan Palangga, Institusi dan Instansi yang berwenang untuk mengkaji khusus masalah hukum penambahan umur dalam proses perkawinan anak dibawah umur, mengingat maraknya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan dampak negatif, kiranya para orangtua dan aparaturnegara memperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa.
2. Mengingat adanya pandangan masyarakat bahwa penambahan umur dalam perkawinan adalah hal yang wajar dari turun temurun maka harus diadakan sosialisasi secara teratur kepada masyarakat bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh jika anak belum mencapai usia dewasa menurut Undang-undang.
3. Perlunya pengawasan secara intens terhadap kinerja PPN untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. PPN hendaknya jangan dengan mudah mengabulkan permohonan seseorang untuk menikah karena bisa berakibat terhadap status pernikahan mereka. Dan bukan tidak mungkin, pasangan yang lain beranggapan bahwa menikah pada usia yang belum memenuhi syarat itu hal yang mudah.
4. Hal-hal yang dapat mendekatkan dan megakibatkan perbuatan tersebut diusahakan untuk di jauhi, agar tidak memunculkan kasus yang sama.

5. Kepada pemerintah setempat, agar mensosialisasikan dan memberikan keterbukaan terhadap masyarakat yang ingin tahu banyak mengenai hukum-hukum, khususnya yang menyangkut dengan perkawinan yang mengakibatkan akibat buruk kepada generasi akan datang.
6. Kepada masyarakat palangga harus memahami hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan hukum Islam terhadap kasus yang penulis angkat, tujuannya agar tercapainya kesejateraan kesadaran, pemahaman, keadilan, serta kemajuan jangka panjang untuk geneasi di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: buku III; Akademika Persero, 1992.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya* Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Australian National University. *Program Kemitraan Masyarakat* Update: 25 march 2014 [www.http://:chl.anu.edu.au/antropologi/kmum/programkemitraan.php](http://chl.anu.edu.au/antropologi/kmum/programkemitraan.php) (25 Agustus 2014).
- Asmawi, Mohammad. *nikah dalam perbincangan dan perbedaan* Yogyakarta: Darusalam, 2004.
- Abu Bakar Bin Mas'ud, Imam Alaudin Al-kasant. *Badai'al Shanai* Juz III; Kairo: Dar Al-Hadits, 1426/2005 M.
- Bugin, Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djazuli, A. *penggalan, perkembangan dan penerapan Hukum Islam* Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an dan Terjemahnya* Bandung: Dipo negro, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Husein, Muhammad, *fiqh Perempuan: Refleksi Kyat Atas Wacana Agama Dan Gender* Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Idris Ramulyo, Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam* Cek. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad, Syeikh Kamil. *Uwaidah, Fiqih Wanita* Cet. I; Jakarta Timur: 1998.
- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah fiqh* Jakarta: pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Ed.I Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Slamet Abidin dan Amiruddin. *Fiqh Munakahat I* Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Bulugul Maram* Cet. I; Yagyakarta; 1989.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI-Pres, 1986.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Cet. V. Jakarta: UI-Press, 1986.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* Jakarta: Gema Insani, 1998

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama MOHAMAD NUROHIM S.H.I., lahir di Minakarya pada tanggal 15 Agustus tahun 1990, kemudian berdomisili di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Penulis adalah anak terahir dari lima bersaudara dari pasangan Fadkhul Majid dan Jamilah. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari SDN sinorang tahun (1997-2003), kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasa Tsanawiah Al-Muhajirin Sinorang (2004-2008). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN Favorit Poso Kota (2007-2010), selama sekolah penulis bekerja di perusahaan Asuransi milik Negara yaitu PT. Jasa Raharja Persero yang di pimpin oleh bapak Saleh Ibrahim SE. lalu melanjutkan kuliah di UIN Alauddin Makassar. (2010-2014). Selama dalam proses menempuh pendidikan di kampus penulis menyibukan diri dengan berwira usaha demi cita-cita menjadi orang sukses dan bisa hidup mandiri, sejak tahun 2010-2011 penulis banyak mencari pengalaman diluar kampus seperti mengajar privat, mengajar mengaji, menjadi FOX (INTEL) di Care Four, dan menjadi kuli bangunan serta ikut bergabung bisnis Multi Level Marketing (MLM). Pada tahun penulis memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Ismawati dan di karuni seorang putri cantik yang bernama Aisyah Jannatul Ma'wa pada tahun 2012 bulan 11, dalam keseharia selain kuliah penulis memulai membuka warung makan siap saji, membuat rempeye (makanan has Jawa), menjadi karyawan diperusahaan PT. Arafah mandiri yang bergerak dibiro perjalanan Haji dan Umroh milik H. Tahir Taro SE dan kini penulis memiliki usaha sendiri yaitu TRAVEL BIRO PERJALNAN yang di berinama PERMATA AIRLINE tour & travel kerja sama dengan perusahaan PT. MMBC tour & travel milik Zulkarnaini sebagai Presiden Direktur utama Pusat Jakarta, dalam perjalanan bisnis travel tersebut penulis telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, selain itu penulis memiliki usaha dibidang servis dan penjualan superpak (alat-alat komputer). Cita-cita penulis yang akan diwujudkan adalah menjadi orang kaya yang dermawan dan sederhana. Target yang ingin dicapai adalah ingin membahagiakan orangtua dan keliling dunia bersama orang-orang yang dicintai.